

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar merupakan suatu lembaga penting dalam menggerakkan aktivitas ekonomi. Keberadaan pasar mampu membantu pemerintah dan tentu juga bagi masyarakat dalam bidang perekonomian (Damsar, 2002:110). Pasar penting bagi perekonomian penduduk desa. Pasar dibutuhkan oleh petani untuk memasarkan produk pertanian atau barang dagangannya. Pasar juga diperlukan oleh pedagang-pedagang dan produsen non-pertanian. Daerah pedesaan membutuhkan pasar untuk melengkapi berbagai kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan masyarakat lainnya. Pasar juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga yaitu tukang parkir, karyawan tambahan, tukang becak, tukang ojek dan jasa angkutan barang lain.

Menurut Rezkyansyah (2011), keberadaan pasar mempunyai fungsi yang sangat penting. Pasar memiliki tiga fungsi utama: sarana distribusi, sarana penetapan harga, dan sarana promosi. Caroline dkk (2007) berpendapat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, keberadaan pasar tradisional mulai menarik perhatian, namun pada saat yang sama mereka menghadapi ancaman, dan semakin banyak pasar yang mungkin “bangkrut” dalam waktu yang tidak lama lagi karena tidak mampu bersaing menghadapi banyaknya pusat perbelanjaan atau pasar modern dengan berbagai fasilitas yang disediakan seperti kenyamanan, kebersihan, kualitas barang, sampai dengan alasan demi gengsi(Chris, 2006).

Pasar tradisional merupakan pasar yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan memiliki keunggulan kompetitif alami

(Chris, 2006). Keberadaan pasar tradisional ini sangat bermanfaat tidak hanya bagi pemerintah daerah dan pusat, namun juga bagi masyarakat yang bermata pencaharian dari kegiatan berdagang. Pasar tradisional penting dan banyak masyarakat yang berupaya meningkatkan taraf hidupnya. Pedagang, pembeli, dan pekerja panggul merupakan aktor yang berperan penting dalam menjaga eksistensi pasar tradisional di Indonesia (Ayuningsasi, 2013).

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional. Berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat tersebut, diderivasi oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Berdasarkan ketetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional (Permendagri, 2012).

Pasar tradisional memiliki nilai-nilai kekeluargaan dibangun dari hasil interaksi dan komunikasi antar masyarakat. Proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli terbangun di pasar tradisional melalui interaksi dari penjual dan pembeli. Tawar-menawar tersebut menghilangkan monopoli harga penjual, yang merupakan ciri sistem ekonomi kapitalis. Bangunan biasanya terdiri dari kios, los, warung makan dan ruang terbuka yang didirikan oleh kios dan pengelola pasar.

Keunggulan pasar tradisional adalah pembeli dan penjual dapat bertemu langsung untuk melakukan transaksi jual beli. Pola bangunan pasar tradisional yang sangat terbuka memungkinkan terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli. Bahkan di zaman modern ini, keberadaan pasar tradisional tidak hanya diperlukan,

tetapi juga tidak dapat dipisahkan dari sistem kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat Indonesia belum memahami manfaat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti pembelian melalui internet. Sampai saat ini pasar tradisional masih dominan peranannya di Indonesia dan masih sangat dibutuhkan keberadaannya, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Menurut Geertz, tekanan persaingan yang paling penting di pasar tradisional bukanlah kemantapan penjual dengan penjual lainnya, melainkan persaingan antara kemantapan penjual dan calon pembeli dalam proses negosiasi (Narwoko & Bagong, 2004: 281).

Pengelolaan pasar adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku seperti pemerintah, pengelola pasar, pedagang, dan masyarakat setempat untuk mengelola pasar agar berfungsi secara efektif, efisien, dan berdaya saing. Pengelolaan pasar mencakup berbagai aspek seperti perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi. (Rasmita, 2021) menyatakan bahwa dalam pengembangan dan pengelolaan pasar, diperlukan tata kelola pasar yang baik untuk menciptakan pasar yang tertib, sehat, aman, bersih, dan teratur.

Tujuan pengelolaan pasar tradisional ialah untuk meningkatkan kualitas pasar, memenuhi keperluan masyarakat, mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia, dan memastikan keselamatan dan keamanan pedagang dan pengunjung pasar tradisional. Pengelolaan pasar tradisional yang baik akan dapat menciptakan pasar yang bersih, tertib, aman, dan nyaman bagi pedagang dan masyarakat sekitar.

Implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional mengacu pada seperangkat aturan, norma, dan prosedur yang ditentukan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang untuk mengatur penyelenggaraan pasar tradisional. Pasar tradisional sendiri merupakan tempat transaksi jual-beli yang sudah ada sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Kebijakan pasar tradisional biasanya mencakup berbagai aspek, seperti pengaturan tata letak pasar, regulasi pembukaan toko, pengelolaan sampah, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta peningkatan kualitas produk yang dijual di pasar tradisional. Tujuan dari kebijakan pasar tradisional adalah untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan para pedagang dan konsumen pasar tradisional, serta meningkatkan kontribusi pasar tradisional terhadap perekonomian lokal.

Kondisi pasar tradisional di Indonesia sebagian besar cukup kotor dan tidak nyaman untuk berbelanja akan namun tetap ramai dikunjungi oleh pembeli. Pengelola pasar, pedagang, dan pengunjung tak peduli dengan kondisi pasar tersebut, budaya kotor terus dipelihara di tempat pasar tradisional, pihak yang terlibat dalam pengelolaan pasar tradisional acuh terhadap kebersihan pasar. Tidak ada tempat sampah untuk memilah sesuai dengan jenis sampah, wadah sampah di pasar tradisional sangat minim.

Gambar 1. 1 Sebaran Pasar Tradisional Di Indonesia Menurut Klasifikasi 2021



Sumber : Direktori Pasar Indonesia, 2020

(<https://www.bps.go.id/pasar/app/direktori>)

Berdasarkan Grafik 1.1 di atas, persebaran pasar tradisional hampir mendominasi seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah 16,235 unit (Data Direktori Pasar Indonesia, 2020). Tahun 2020, delapan provinsi dengan persebaran pasar tradisional terbanyak terdapat di Jawa Timur (2.359 unit), Jawa Tengah (1.977 unit), dan Sumatera Utara (858 unit). Kemudian diikuti oleh Sumatera Selatan (845 unit), Jawa Barat (816 unit), Sulawesi Selatan (808 unit), Riau (709 unit) dan Lampung (651 unit). Umumnya, pasar tradisional di Indonesia terletak di dekat kawasan pemukiman penduduk agar memudahkan warga mencapai lokasi pasar. Pasar yang paling umum di Indonesia beroperasi dari pagi sampai sore hari, dan menjual bahan bahan pangan yang masih segar. Pasar tradisional merupakan tempat penghasilan penduduk setempat, namun seiring berkembangnya zaman, pasar

tradisional mulai tergusur oleh pasar modern. Pasar tradisional di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 berjumlah 899 pasar yang terdiri dari pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang dilihat dari tabel dibawah:

Tabel 1. 1 Jumlah Sebaran Pasar dan Pusat Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Menurut Klasifikasi Pasar 2021

Provinsi	Pasar Tradisional	Pusat Perbelanjaan	Toko Swalayan
Sumatera Utara	858	23	18
Total	899		

Sumber: Direktori Pasar Indonesia, 2021.

Kota Binjai merupakan salah satu kota (dahulu daerah tingkat II berstatus kotamadya) dalam wilayah provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Perdagangan menjadi salah satu sektor yang paling berkontribusi dalam perkembangan Kota Binjai. Tahun 2022 terdapat 10 pasar di Kota Binjai. Kecamatan Binjai Kota memiliki pasar yang paling banyak yang berjumlah 14 pasar sedangkan di Kecamatan lainnya (Kec. Binjai Selatan, Kec. Binjai Timur, Kec. Binjai Utara dan Kec. Binjai Barat) hanya terdapat masing-masing satu pasar. Pasar di Kec. Binjai Kota terbagi menjadi 10 pasar dengan status kelas III sedangkan empat pasar lainnya ada dalam status kelas II.

Pengelolaan pasar tradisional merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Binjai sebagai bentuk pelayanan publik kepada masyarakat karena dengan semakin baik pengelolaan pasar maka retribusi pasar di Kota Binjai akan semakin meningkat. Sebaliknya, jika pengelolaan yang diberikan oleh pemerintah kurang efektif dan efisien, sementara pihak yang dilayani terus dituntut untuk memenuhi kewajiban dengan membayar berbagai jenis retribusi, namun hak-hak mereka

kurang dipenuhi, maka pada akhirnya akan timbul ketidakpuasan dari para konsumen atau pelanggan pasar. Sementara kenyamanan dan pelayanan terhadap sarana dan prasarana tidak sesuai dengan harapan para pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemerintah dalam pengelolaan pasar tradisional dan mengingat kondisi pasar tradisional yang.

Berdasarkan data dari BPS Kota Binjai tahun 2024, Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai telah mengelola pasar tradisional sebanyak 10 pasar yang tersebar di 5 (lima) kecamatan. Semua pasar tradisional tersebut mendapat perhatian khusus dari Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai terutama dalam pengelolaan pasar tradisional, sehingga untuk menjadikan pasar tradisional menjadi lebih baik dan berkembang Walikota Binjai mengatur beberapa hal penting tersebut melalui Pasal 17 Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2016. Sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2016 Pengelolaan Pasar terdiri dari :

- a) Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
- b) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan memberi perlindungan, pemeliharaan pasar dalam menjaga ketertiban dan keamanan pasar;
- c) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan pasar;
- d) Memberikan arahan kepada para pedagang agar menjaga penggunaan fasilitas yang ada sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- e) Melakukan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas pasar.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2016 di atas, Pasar Tavip sudah mempunyai struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas, akan tetapi penerapan manajemen masih kurang profesional. Manajemen yang kurang profesional dapat dilihat dari tidak adanya pembangunan gedung pasar Tavip kembali setelah kebakaran pada tahun 2016.

Gambar 1. 2 Kebakaran Gedung Pasar Tavip (2016)



Sumber: TRIBUN-MEDAN.COM

Berdasarkan Gambar 1.2 di atas, tahun 2016 Pasar Tavip mengalami kebakaran pada lantai dua dan lantai tiga yang berasal dari korsleting listrik. Pasar Tavip yang mengalami kebakaran pada tahun 2016 lalu membuat ratusan pedagang kehilangan lokasi berjualan. Kebakaran yang terjadi pada bangunan pasar membuat pasar menjadi terbengkalai karena tidak adanya perbaikan. Pada sisi lain para penjual yang terkena kebakaran berpindah tempat ke wilayah sekitar pasar dan membangun ulang toko-toko berjajar di pinggir jalan. Hal ini memicu kemacetan yang parah karena para penjual mendirikan toko yang mengambil hak jalan kendaraan.

Gambar 1. 3 Bangunan Pasar Tavip Kota Binjai Diratakan



Sumber: Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=yI_kf5LBCaQ)

Berdasarkan **Gambar 1.3**, dapat dilihat kondisi Pasar Tavip yang sudah diratakan dari gedung-gedung sisa kebakaran. Perataan gedung sisa kebakaran dilakukan pada Bulan Maret 2023 namun masih belum adanya kelanjutan dari pengelolaan lahan tersebut.

Gambar 1. 4 Kondisi Pasar Tavip Yang Terbengkalai



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023.

Berdasarkan **Gambar 1.4**, terlihat kondisi Pasar Tavip setelah diratakan pada Bulan Maret 2023 yang lalu. Pasar Tavip saat ini sangat memprihatinkan dikarenakan banyaknya sampah yang berserakan dan belum adanya kejelasan mulai Bulan Maret 2023 sampai sekarang (Oktober, 2023) dari pihak pengelolaan Pasar Tavip Kota Binjai mengenai pembangunan gedung baru untuk pedagang.

Gambar 1.5 Lahan Parkir Yang Tidak Tersedia



Sumber : bkppkutim.com

(<https://bkppkutim.com/pasar-tavip-binjai-16372632045987831130/>)

Berdasarkan **Gambar 1.5** di atas menunjukkan bahwa lahan parkir di kawasan Pasar Tavip Kota Binjai belum tersedia akibatnya para pengunjung parkir sembarangan. Dalam memberi perlindungan, pemeliharaan pasar dalam menjaga ketertiban dan keamanan pasar belum dilaksanakan sesuai dengan tugas yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Binjai ingin melakukan penataan ulang terhadap tempat parkir tapi hingga saat ini Pemerintah Kota Binjai belum melakukan penataan ulang terhadap tempat parkir.

Gambar 1.6 Pengelola Pasar Tavip Binjai Tidak Melakukan Sosialisasi Kepada Pedagang



"Kalau itu sudah jelas ingin direnovasi atau revitalisasi, sambung Heru Suwito, seperti apa mekanismenya harus jelas. Kami juga pedagang harus diajak sosialisasi, itu mekanismenya, dan juga bila ada perjanjian dalam bentuk apapun, kita para pedagang harus mengetahui. Semua harus transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi kepada para pedagang," tegas Heru.

Sumber: <https://www.snipers.news/2022/12/pedagang-resah-soal-akan-di-lakukan.html>

Berdasarkan **Gambar 1.6** menunjukkan bahwa pembangunan kembali Pasar Tavip Kota Binjai tidak dilakukan secara transparan dan tidak adanya sosialisasi kepada para pedagang yang membuat para pedagang resah dan bingung. Bahkan berdasarkan informasi dari *Snipers.News*, para pedagang sudah menyurati DPRD Kota Binjai untuk bertemu dan meminta perlindungan, karena sudah pasti akan ada relokasi untuk para pedagang. Dalam hal ini memberikan arahan kepada para pedagang belum terlaksana dengan baik.

Gambar 1. 7 Sampah Pasar Tavip Kota Binjai di Pinggir Sungai



Sumber: Artikel Redaksi (<https://prestasireformasi.com/2021/03/17/sampah-pasar-tavip-binjai-menggunung-di-pinggir-sungai/#slide0>)

Permasalahan infrastruktur yang masih menjadi permasalahan serius di pasar tradisional antara lain buruknya kebersihan dan pengelolaan tempat pembuangan sampah yang kurang terpelihara, serta kurangnya lahan parkir untuk para pengunjung. Berdasarkan **Gambar 1.7**, masih banyaknya pedagang Pasar Tavip yang membuang sampah ke sungai karena kekurangan bak penampungan sampah. Sampah Pasar Tavip Kota Binjai menumpuk di pinggir sungai bahkan

berjatuhan ke Sungai Binggai yang melintasi Pasar Tavip Kelurahan Pakan Binjai, Kecamatan Binjai Kota-Kota Binjai, Provinsi Sumut. Tumpukan sampah tersebut tidak hanya menimbulkan bau tidak sedap, namun juga menjadi perbincangan warga karena dinilai turut merusak tampilan bantaran sungai. Kondisi ini meresahkan warga di sekitar Sungai Binggai karena tumpukan sampah mengkontaminasi air sungai yang biasanya digunakan dalam kegiatan sehari-hari seperti mencuci pakaian dan lainnya. Ironisnya, instansi yang menangani sampah tersebut tidak peduli. Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai tidak maksimal dalam melakukan pengawasan di sekitar Pasar Tavip Kota Binjai. Hal ini terbukti dari sampah yang semakin bertambah banyak setiap harinya. Tempat sampah yang dalam pengelolaannya masih meresahkan masyarakat sekitar karena belum ada tempat pembuangan sampah setelah selesai kegiatan pasar. Penentuan proses kegiatan implementasi dari pemerintah harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2016 yang telah disebutkan di atas dapat diketahui bahwasannya Pemerintah berkewajiban melakukan pengelolaan terhadap pasar tradisional khususnya yang ada di Pasar Tavip Kota Binjai. Dinas Pasar Kota Binjai bertugas untuk melakukan pengelolaan Pasar Tavip. Pencapaian pengelolaan pasar tradisional yang lebih baik Pemerintah cenderung mengalami beberapa kendala yang mengakibatkan kurangnya atau terhambatnya perkembangan pemberdayaan dan pengelolaan pasar tradisional di Kota Binjai. Pemerintah diwajibkan cepat dan tanggap dalam menanggulangi

kendala-kendala pengelolaan pasar tradisional di Kota Binjai khususnya di Pasar Tavip.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional di Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara”

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

- 1) Manajemen yang kurang profesional dapat dilihat dari tidak adanya pembangunan gedung pasar Tavip kembali setelah kebakaran pada tahun 2016.
- 2) Tidak ada lahan parkir atau pemeliharaan pasar dalam menjaga ketertiban dan keamanan pasar
- 3) Tidak adanya sosialisasi kepada pedagang
- 4) Fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai terkait bak penampungan sampah

1.2.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara?
- 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara
- 2) Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan manfaat dalam pengembangan bidang keilmuan terkait kajian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Tavip Binjai Sumatera Utara. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya serta menjadi acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2. Kegunaan secara praktis

a) Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara.

b) Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi akademis atau pihak-pihak yang berkompeten dalam pencarian informasi atau sebagai referensi mengenai implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara.

c) Bagi Pembaca

Dengan dilangsungkannya penelitian ini, pembaca dapat memperoleh pengetahuan tambahan terkait implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan peneliti untuk membuat suatu karya dalam menambah pengetahuan dalam teori maupun materi yang belum ada. Penelitian terdahulu ini juga digunakan oleh peneliti untuk mengembangkan karya penelitian yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pengelolaan pasar. Oleh karena itu, peneliti akan menulis beberapa jurnal terdahulu yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No .	Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode dan Teori	Hasil Penelitian
1	Yulio Astria Yudha Firnanda, Lukman Arif (2022)	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Pada Pasar Sukodono Kabupaten Sidoarjo	Penelitian ini memiliki tujuan guna untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Pada Pasar Sukodono Kabupaten Sidoarjo	a.Penelitian kualitatif b.Penelitian ini dianalisis menggunakan Prinsip Pengelolaan Pasar Rakyat berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 8152-2015 Tentang Pasar Rakyat yaitu efisien, efektif, produktif,	Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan pasar rakyat di Pasar Sukodono sudah diimplementasikan namun belum optimal secara keseluruhan. Hal ini terlihat pada fokus efisien, akuntabel, kepentingan umum, berwawasan lingkungan,

				akuntabel, kepentingan umum, berwawasan lingkungan, tanggung jawab sosial, dan gotong royong.	tanggung jawab sosial dan gotong royong telah dilaksanakan dengan baik. Namun pada fokus efektif dan produktif belum dilaksanakan dengan maksimal.
2	M. Natsir (2017)	<i>The Implementati on Of Management Policies On Traditional Market Own By Government In Kabupaten Mamuju Utara</i>	Penelitian bertujuan berbicara tentang menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional oleh pemerintah Kabupaten Mamuju Utara guna menemukan konsep baru tentang implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional.	A. Penelitian Kualitatif B. Penelitian ini menggunakan teori Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn, dengan enam faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu standard dan tujuan, sumber daya, komunikasi inter-organisasi dan aktivitas pelaksanaan, disposisi pelaksana, karakteristik badan pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi dan politik	Hasil penelitian menunjukkan, implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan disebabkan standar dan sasaran yang tidak konkrit dan terukur, sumber daya yang tersedia kurang memadai, sikap dan karakteristik organ pelaksana yang birokratis, komunikasi tidak berjalan dengan baik, dan kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik belum memberikan kontribusi yang berarti. Adapun faktor yang paling berpengaruh adalah sikap implementor, sumber daya dan komunikasi. Diyakini, apabila implementor bersikap

					profesional, sumber daya memadai dan komunikasi terbangun dengan baik, maka implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional akan dapat berjalan efektif dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Efektifitas implementasi kebijakan yang sifatnya lintas sektoral diperlukan kerjasama antar implementor.
3	Desemti Wahyu Merlian (2014)	Implementasi Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Study Di Dinas Pasar Kota Malang)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Malang, dan untuk mengetahui, menemukan, serta menganalisis	A.Penelitian Kualitatif b. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan	Pada hasil penelitian telah dapat diketahui bahwa pemberdayaan pasar tradisional di Kota Malang belum optimal karena terdapat hambatan ± hambatan yang ada di lapangan. Hambatan tersebut antara lain karena kurangnya kesadaran diri dari para pedagang pasar tradisional, lokasi pasar tradisional yang kurang strategis, kurangnya anggota dalam menjalankan pemberdayaan pasar tradisional, dan kurangnya pengalokasian

			hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pasar Kota Malang Penelitian dilakukan dengan metode yuridis sosiologis.		dana. Dengan demikian upaya yang dilakukan Dinas Pasar Kota Malang kedepan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan memberikan sosialisasi kepada para pedagang pasar tradisional, memilih lokasi strategis untuk mendirikan pasar tradisional, meminta tambahan personil yang kepada Badan Kepegawaian Daerah, menjadikan anggaran ke Pemerintah Kota agar menjadi skala prioritas.
4	Erry Pratama, Diana Hertati (2021)	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Pada Pasar Buduran Kabupaten Sidoarjo	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan pasar rakyat di Pasar Buduran Kabupaten Sidoarjo.	a. Penelitian Kualitatif b. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan pasar rakyat sudah dilaksanakan, namun masih terdapat permasalahan dalam implementasinya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan pengelolaan pasar rakyat dalam

					implementasinya masih belum optimal, hal ini terlihat dari indikator keberhasilan implementasi kebijakan.
5	Pungky Praja Jatmika (2017)	Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Di Kota Probolinggo	Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo	a.Penelitian Kualitatif b.Penelitian ini menggunakan teori : 1.Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pasar Tradisional 2.Kebijakan Pemerintah Dalam Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional 3.Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Pasar Tradisional 4. New Public Management dalam Pengelolaan Pasar Tradisional	Pemerintah Daerah Kota Probolinggo masih perlu membuat kebijakan alternatif sebagai solusi dalam pengelolaan Pasar Baru di Kota Probolinggo. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dalam pengelolaan Pasar Baru sebenarnya sudah dilaksanakan baik tentang pembangunan fisik pasar maupun non fisik pasar, akan tetapi beberapa permasalahan dalam pengelolaan pasar baru masih belum terselesaikan dengan baik karena masih adanya kondisi pasar yang masih kumuh/becek saat musim hujan, parkir dan jalan sekitar pasar masih semrawut dan banyaknya

					pedagang yang berada di luar pasar untuk menjual dagangannya.
6	H.Mukhlis Hannan, 2Abd. Asis, 3 Nirwana (2020)	Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Pasar Baru Polewali Kab. Polewali Mandar	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pasar tradisional di pasar baru polewali, dan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pungutan retribusi pasar baru polewali dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam pengelolaan pasar tersebut.	A. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. B. penelitian ini menggunakan teori penataan pasar	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan pasar tradisional di pasar baru polewali sudah dilakukan dengan baik, petugas pasar baru polewali sudah berupaya memberikan pengelolaan secara maksimal terlihat dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Faktor yang mendukung dalam pengelolaan pasar baru polewali dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan banyaknya pedagang yang berdagang di pasar baru polewali pada saat musim buah-buahan dimana pedagang dari berbagai macam wilayah datang untuk berdagang di pasar tersebut. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah masih ada beberapa pedagang yang tidak melakukan penyetoran

					retribusi pasar dan parkir kendaraan di pasar baru yang masih acak-acakan dikarenakan kurangnya kerjasama antara Ka. Pasar baru polewali dengan petugas dari Dishub yang mengelola parkir kendaraan di pasar baru polewali.
7	Fricilia Kotongan, Joyce Rares Dan Deisy Tampongangoy (2019)	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Kecamatan Pasan Di Kabupaten Minahasa Tenggara.	Tujuan nya untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan pasar.	a. Penelitian Kualitatif b. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik dan model Implementasi Kebijakan.	Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Kecamatan Pasan masih belum berjalan baik, dilihat dari aspek pengorganisasi, Interpretasi dan Aplikasi/ Penerapan.
8	Avinda Rahmawati (2019)	Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Penataan Pasar Bulu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional	Tujuan penelitian ini Mengidentifikasi implementasi kebijakan pemerintah Kota Semarang dalam penataan pasar Bulu berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional dan	a. Penelitian Kualitatif b. Penelitian ini menggunakan teori Kebijakan Publik.	Hasil penelitian penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam penataan pasar tradisional Bulu Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 dibuat berdasarkan masalah yang sedang terjadi di

			Mengetahui implementasi kebijakan pemerintah Kota Semarang dalam penataan Pasar Bulu berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional.		kota Semarang yaitu semakin ditinggalkannya pasar tradisional oleh pelanggan karena kesan negatif pasar tradisional. Perda Nomor 9 Tahun 2013 ada untuk menghadapi masalah tersebut.
9	Isti Uci Prasasti (2019)	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Desa Di Desa Tanjung Tebat Kabupaten Lahat	Untuk mengetahui dan menjelaskan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Desa di Desa Tanjung Tebat Kabupaten Lahat.	a. Penelitian Kualitatif b. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik dan model Implementasi Kebijakan.	Hasil penelitian Dengan adanya penelitian ini, diharapkan kedepannya bisa menjadi pertimbangan serta menjadi gambaran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat terutama Kecamatan Tanjung Tebat agar lebih memperhatikan dan membuat kebijakan yang dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
10	Haji Mukti Ramadhani, S.Sos, Prof. Dr. V. Rudy Handoko	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar (Studi Kasus Pasar Induk Amuntai	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi	a. Penelitian Kualitatif b. Penelitian ini menggunakan teori Kebijakan Publik dan Implementasi	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar (Studi Kasus Pasar Induk Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara) dapat

	, MS, Dr. Endang Indartuti, M.Si (2022)	Kabupaten Hulu Sungai Utara)	Kebijakan Pengelolaan Pasar (Kasus Pasar Induk Amuntai Studi) sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan revisi.	Kebijakan Publik.	disimpulkan masih lemah di beberapa sektor seperti sektor komunikasi dan sumber daya, hal ini bisa dilihat dari keempat variabel yang telah disebutkan oleh George Edwards III, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi atau Sikap Pelaksana, Dan Struktur Birokrasi, dan terdapat dua variabel yang masih lemah yaitu variabel Komunikasi dan Sumber daya.
11	Lutfiyanus Silviani (2012)	Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Di Kota Malang (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Pasar Dan Tempat Berjualan Pedagang)	1.Mengetahui Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Kota Malang secara konkrit. 2.Mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pasar Tradisional di Pasar Besar Kota Malang	a. Penelitian Kualitatif b. Peneliti menggunakan analisis data Miles dan Huberman dengan tiga proses yakni mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan pasar di kota malang salah satunya adalah pengaturan perizinan dan standarisasi pasar. Setiap pedagang yang akan berjualan di pasar diwajibkan mengurus perizinan di Dinas Pasar, dan juga setiap pasar di Kota Malang diharuskan memenuhi semua standar pasar yang telah ditetapkan.

					<p>Selanjutnya kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Kota Malang telah diimplementasikan di 28 pasar di Kota Malang tetapi ada beberapa kewajiban pedagang yang tidak dipatuhi dengan baik yaitu terkait menjaga kebersihan pasar dan menata barang dagangan.</p> <p>Mengakibatkan kondisi pasar menjadi kotor dan jalanan pasar sulit untuk dilalui pengunjung pasar. Barang-barang dagangan di pasar tradisional terkesan tidak tertata dengan rapi sehingga menjadikan suasana pasar yang kumuh.</p> <p>Pelaksanaannya juga masih terhambat oleh perbedaan luas area pasar, tarif mendapatkan ijin terlalu besar, kurangnya kesadaran pedagang sehingga berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pengelolaan pasar</p>
--	--	--	--	--	---

					tradisional di pasar Kota Malang.
12	Aptria Ansma Luthfi. A e (2023)	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Di Kota Pekanbaru	Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan kemudian analisis untuk memperoleh hasil yang dapat memberikan gambaran tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat di Kota Pekanbaru serta menguraikan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut yaitu membantu Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menertibkan pasar rakyat yang tidak memiliki izin atau ilegal.	a. Penelitian Kualitatif b. Penelitian ini menggunakan Teori yang digunakan dalam mengukur kinerja implementasi kebijakan tersebut adalah teori Edward III, yakni beberapa faktor yang dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus.	Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat di Kota Pekanbaru dapat dikatakan sudah cukup baik karena sesuai dengan tujuan meminimalisir adanya pasar rakyat ilegal tanpa adanya izin dari Pemerintah Kota Pekanbaru dengan melaksanakan penertiban dengan memberikan surat teguran dan agar segera mengurus kepada pedagang yang berjualan untuk bergabung di pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru
13	Hardilina (2016)	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar	Untuk menganalisis implementasi kebijakan	a. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah	Hasil penelitian menunjukkan, implementasi kebijakan

		Tradisional Dahlia Kota Pontianak	pengelolaan pasar Dahlia oleh pemerintah Kota Pontianak.	metode kualitatif dengan jenis penelitian diskriptif. b. Penelitian ini menggunakan teori Edward III	pengelolaan pasar Dahlia belum terlaksana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan disebabkan kurang jelasnya aturan pelaksanaan sehingga mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Pengelolaan pasar Dahlia yang sifatnya lintas sektoral mengalami kendala yang serius dalam melakukan komunikasi karena masing-masing instansi mempunyai birokrasi tersendiri, akibatnya koordinasi sebagai sarana untuk memperoleh keselarasan dan keharmonisan dalam bertindak tidak dapat berjalan dengan baik.
14	Aza Rizki Damayanti (2020)	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Di Pasar Rejowinangun Kota Magelang	Untuk menganalisis dan mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Rejowinangun Kota Magelang.	a. Penelitian Kualitatif b. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori implementasi Soren C. Winter yang terdiri dari 3 proses implementasi yaitu perilaku organisasi	Hasil penelitian menunjukkan perilaku organisasi dan antar organisasi dilihat dari komitmen belum optimal yang disebabkan terbatasnya sumber daya finansial dan usaha yang dilakukan belum sepenuhnya

				<p>(<i>organization behavior</i>) dan perilaku antar organisasi (<i>interorganizational behavior</i>), perilaku birokrat tingkat bawah (<i>street-level bureaucracy behavior</i>) dan perilaku kelompok sasaran (<i>target group behavior</i>).</p>	<p>berhasil untuk meramaikan kembali Pasar Rejowinangun. Pada perilaku birokrat tingkat bawah dilihat dari diskresi menunjukkan tidak semua birokrat tingkat bawah mampu untuk melakukan diskresi. Sedangkan perilaku kelompok sasaran menunjukkan adanya respon negatif pedagang terkait sistem penempatan pedagang yang disebabkan kurangnya pemahaman terhadap kebijakan yang dilakukan dan keadaan pasar tradisional yang sepi menyebabkan pedagang menutup sebagian tempat usahanya serta beberapa dari pedagang tersebut bahkan belum memiliki Surat Izin Tempat Usaha.</p>
15	H.Mukhlis Hannan, Abd. Asis, Nirwana. (2020)	Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Pendapatan	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pasar tradisional di pasar baru	a.Penelitian Kualitatif b. Teori yang digunakan dalam menganalisis "Kebijakan Pemerintah dalam	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan pasar tradisional di pasar baru polewali sudah dilakukan dengan baik, petugas pasar baru polewali sudah

		<p>Asli Daerah Di Pasar Baru Polewali Kab. Polewali Mandar</p>	<p>polewali, dan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pungutan retribusi pasar baru polewali dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam pengelolaan pasar tersebut.</p>	<p>Pengelolaan Pasar Tradisional dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Pasar Baru Polewali Kab. Polewali Mandar” adalah teori yang dikemukakan oleh Terry dalam The Liang Gie (2000), bahwa kegiatan atau fungsi pengelolaan meliputi perencanaan (<i>planning</i>), pengorganisasian (<i>organizing</i>), pengarahannya (<i>actuating</i>), pengawasannya (<i>controlling</i>).</p>	<p>berupaya memberikan pengelolaan secara maksimal terlihat dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Faktor yang mendukung dalam pengelolaan pasar baru polewali dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan banyaknya pedagang yang berdagang di pasar baru polewali pada saat musim buah-buahan dimana pedagang dari berbagai macam wilayah datang untuk berdagang di pasar tersebut. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah masih ada beberapa pedagang yang tidak melakukan penyetoran retribusi pasar dan parkir kendaraan di pasar baru yang masih acak-acakan dikarenakan kurangnya kerjasama antara Ka. Pasar baru polewali dengan petugas dari Dishub yang mengelola parkir kendaraan di pasar baru polewali.</p>
--	--	--	--	---	--

Berdasarkan Tabel 1.5 mengenai matriks penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dalam penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu memiliki manfaat untuk mengetahui teori serta hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian terdahulu berguna sebagai tolak ukur dan gambaran bagi peneliti dalam menulis dan menganalisis penelitian. Adanya penelitian terdahulu juga digunakan sebagai pembeda antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan, setiap peneliti memiliki perbedaan dengan peneliti sebelumnya, baik teori maupun lokus penelitiannya. Terlihat dari 15 judul penelitian yang dijadikan sumber oleh peneliti dalam pengambilan lokus tidak ada yang sama dengan peneliti, dan regulasi yang mendukung berbeda. Penelitian milik Fricilia Kotangon, Joyce Rares dan Deisy Tampongangoy menggunakan Peraturan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, pemerintah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tersebut maka bidang pengelolaan pasar merupakan pihak yang berwenang dalam pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian M. Natsir menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, telah dijelaskan bahwa retribusi pasar merupakan salah satu retribusi daerah yang potensial di Kabupaten Mamuju Utara sedangkan peneliti menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Perbedaan yang kedua dilihat dari masalah dan tujuan penelitian. Lokus penelitian juga berbeda 15 penelitian terdahulu masing-masing mengambil lokus di Kabupaten Sidoarjo, Mamuju Utara, Kota Malang, Pasar Banduran Kabupaten

Sidoarjo, Kota Probolinggo, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kota Semarang, Desa Tanjung Tebat Kabupaten Lahat dan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kota Malang, Kota Pekanbaru, Kota Pontianak, Kota Magelang, Kabupaten Polewali Mandar sedangkan peneliti mengambil lokasi di Kota Binjai. Walaupun topik yang diangkat sama, yaitu tentang implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di pasar namun lokus yang dituju berbeda otomatis mempengaruhi masalah dan tujuan penelitian. Perbedaan yang ketiga yaitu terletak pada teori atau model, tipe penelitian dan teknik analisis yang digunakan. Peneliti tidak memiliki kesamaan terhadap ketiga aspek tersebut dan peneliti menggunakan Pasal 17 Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2016 tentang tugas Kepala Seksi Pengelolaan Pasar untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Tavip Binjai dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif.

1.5.2 Administrasi Publik

Chandler dan Plano (Keban, 2014:3) mendefinisikan bahwa administrasi publik adalah sebuah upaya yang mengorganisir dan mengkoordinasikan sumber daya dan juga personal publik dalam membentuk sebuah formulasi, menerapkannya, serta mengelola sejumlah keputusan yang akan diterapkan ke dalam kebijakan publik.

John M. Pfiffner dan Robert V. Presthus dalam Inu Kencana Syafie (2006:23) mendefinisikan administrasi publik sebagai implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik. Selanjutnya, Administrasi Publik didefinisikan sebagai sebagai koordinasi usaha-usaha individu dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah.

Prajudi Atmosudirdjo berpendapat bahwa administrasi publik adalah administrasi dari negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan. Menurut Dwight Waldo Administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah (Amani et al., 2013).

Administrasi publik dimaksudkan sebagai organisasi dan administrasi dari unit-unit organisasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan kenegaraan. Tujuan kenegaraan tersebut meliputi upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan barang-barang publik dan memberikan pelayanan publik (Kristiadi, 1994:23). Siagian (dalam Waluyo, 2007: 37) berpendapat bahwa administrasi publik sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa pengertian tentang administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan publik.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Menurut Nicholas Henry (dalam Aneta, 2012), mengemukakan bahwa dalam administrasi publik memiliki 6 (enam) paradigma yaitu:

1) Paradigma Ke-1 (Dikhotomi Politik-Administrasi) 1900-1926

Paradigma ini menggaris bawahi posisi dari administrasi negara itu berada, paradigma ini dikemukakan oleh Frank J. Goodnow dan Lenand D. White yang mengatakan bahwa administrasi negara semestinya berorientasi pada birokrasi

pemerintahan. Namun pandangan paradigma ini menimbulkan persilangan di antara para akademisi dan praktisi perihal dikotomi politik-administrasi. Disampaikan bahwa administrasi negara merupakan sub bidang ilmu politik.

2) Paradigma Ke-2 (Prinsip-Prinsip Administrasi Negara) 1927-1937

Paradigma kedua dikemukakan oleh Luther H. Gulick dan Lyndall Urwick pada tulisannya yang berjudul *Paper on the Science of Administration* yang dikenal dengan konsep POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*) POSDCORB merupakan istilah yang meliputi tanggung jawab eksekutif untuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penyusunan staf, koordinasi, pelaporan, dan penganggaran.

3) Paradigma Ke-3 (Administrasi Negara Sebagai Ilmu Politik) 1950- 1970.

Paradigma ini awalnya mempertanyakan apakah pemisahan antara administrasi dan politik itu mustahil atau tidak praktis, sementara Herbert Simon mengkritik prinsip-prinsip pemerintahan yang tidak konsisten dan bahwa prinsip-prinsip ini tidak dapat diterapkan secara universal. Dalam konteks itu, penyelenggaraan negara tidak lepas dari nilai-nilai tetapi dipengaruhi oleh nilai-nilai tertentu. Dalam hal ini, terdapat kontradiksi antara jawaban mengenai nilai administrasi liberal di satu sisi dan asumsi politik yang valid di sisi lain. Faktanya, hipotesis kedua valid karena John Gaus menjelaskan bahwa teori manajemen publik pada dasarnya adalah teori ilmu politik.

4) Paradigma Ke-4 (Administrasi Negara Sebagai Ilmu Administrasi) 1956-1970

Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi. Prinsip manajemen yang sebelumnya populer di model ini. dikembangkan mendalam dan

ilmiah penerapan teknologi modern, perilaku organisasi, analisis sistem dan manajemen, serta riset operasi. Ini adalah objek dari model ini model-model tersebut memiliki dua arah pembangunan muncul dalam model ini, yakni arah ilmu administrasi murni yang didukung ilmu disiplin psikososial, serta arah pembangunan menuju kebijakan publik.

5) Paradigma Ke-5 (Administrasi Negara Sebagai Administrasi Negara) 1970-Sekarang

Paradigma ini biasa disebut Paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik Paradigma ini memiliki orientasi serta posisi yang pasti. Dalam model ini, administrasi publik berfokus pada teori manajemen serta kebijakan publik, dan teori organisasi yang mana fokusnya pada isu serta kepentingan publik.

6) Paradigma Keenam (*Governance*) 1990-Sekarang

Paradigma ini merupakan paradigma terakhir, yaitu "*governance*" *Governance* memiliki arti sebagai pelaksana kekuasaan atau otoritas oleh penguasa politik demi mencapai kesejahteraan masyarakat yang ada dalam suatu negara dan memiliki proses yang rumit sehingga masyarakat yang memiliki kewenangan menyebarluaskan dan melaksanakan kebijakan publik secara langsung berpengaruh kepada warga negara dan lembaga serta dapat mempengaruhi juga terhadap pembangunan ekonomi dan sosial.

Beberapa paradigma administrasi publik di atas, paradigma yang sesuai dengan penelitian ini yaitu paradigma kelima atau disebut dengan Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970) dikarenakan lokus dari paradigma ini adalah pada masalah-masalah publik dan kepentingan publik.

1.5.4 Kebijakan Publik

Easton (1971:18) dalam Solichin Abdul Wahab (2015:13) merumuskan kebijakan publik sebagai *“the relationship of governmental unit it's environment”* (sebuah hubungan diantara unit/satuan pemerintahan dengan lingkungannya). Dunn dalam Wibawa (1994:50) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian pilihan tindakan pemerintah (termasuk pilihan untuk tidak bertindak) guna menjawab tantangan yang menyangkut kehidupan masyarakat. Dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik mempunyai beberapa elemen sebagaimana yang disimpulkan oleh Anderson dalam Widodo (2008:14) yang antara lain mencakup beberapa hal berikut :

- a) Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
- b) Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- c) Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
- d) Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
- e) Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu yang bersifat memaksa.

Kebijakan pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu dan untuk melakukan kegiatan tertentu, agar tercapainya suatu tujuan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang

dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan bangsa (Agustian, 2019).

Jenkins (1978:15) menyebutkan bahwa kebijakan negara (*public policy*) adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang pelaku/aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor politik tersebut).

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan segala tindakan yang dilakukan pemerintah untuk melaksanakan hak dan kewajiban terhadap urusan publik untuk mencapai kesejahteraan publik.

1.5.5 Teori Implementasi Kebijakan

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (2004) (Webster dalam Wahab (2004:64)) adalah: Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu Grindle (1980:7). Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah

tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter dan van Horn yang dikutip oleh Parsons (1995: 461) dan Wibawa, dkk., (1994:15) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. implementor dalam kurun waktu tertentu.

1.5.6 Model- model Implementasi Kebijakan

1. Donald Van Meter dan Carl Van Horn

Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn, merupakan model implementasi yang paling klasik. Penggunaan model tersebut yang dirumuskan oleh Meter dan Horn disebut dengan A Model Of The Policy Implementation. Artinya dalam proses implementasi, sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang ada secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel.

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik implementor dan kinerja kebijakan publik. Dikemukakan bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijaksanaan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel-variabel yang saling berkaitan (Ali, Alam 2012:110). Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu:

1. Ukuran Dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal, maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana, tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi atau sikap para pelaksana (implementors).

2. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Merencanakan implementasi kebijakan penting untuk mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, mengalokasikan mereka dengan bijak, dan memastikan bahwa mereka tersedia sepanjang jalur implementasi.

3. Komunikasi antar organisasi

Penting untuk diingat bahwa komunikasi bukan hanya tentang penyampaian informasi tetapi juga tentang menumbuhkan pemahaman, dukungan dan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan. Memperhatikan prinsip komunikasi yang efektif, maka implementasi kebijakan mempunyai peluang keberhasilan yang lebih besar.

4. Karakteristik agen pelaksana

Karakter atau sifat organisasi yang meliputi struktur birokrasi yaitu mencakup struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi organisasi, koordinasi antar organisasi dan proses interaksi antar organisasi.

5. Sikap para pelaksana

Sikap para pelaksana atau kecenderungan tersebut berperan penting dalam implementasi kebijakan yang seharusnya. Jika para pelaksana kebijakan mempunyai sikap positif dan suportif, maka peluang keberhasilan implementasi kebijakan akan jauh lebih besar.

6. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik merupakan aspek eksternal dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan. Aspek ini dapat mendukung maupun menghambat berjalannya implementasi kebijakan. Maka dari itu antara lingkungan sosial, ekonomi dan politik harus saling kondusif.

2. Menurut Edward C III

Edward C III (dalam Subarsono, 2011) memperkenalkan implementation problem approach yang mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan merumuskan 4 (empat) variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

a) Komunikasi, komunikasi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Komunikasi yang efektif dapat membantu memberikan informasi kepada para aktor, pemangku kepentingan, dan masyarakat mengenai tujuan, sasaran, dan perubahan kebijakan

yang akan dilakukan. Komunikasi bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga tentang membangun pemahaman, dukungan, dan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan.

b) Sumber daya, implementasi kebijakan memerlukan sumber daya yang cukup untuk mencapai tujuan kebijakan secara efektif. Sumber daya ini mencakup berbagai elemen yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan dengan sukses. Jika sumber daya yang diperlukan tidak mencukupi, implementasi kebijakan mungkin akan sulit mencapai tujuan yang diinginkan.

c) Disposisi/sikap, implementasi kebijakan juga melibatkan sikap atau disposisi yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Sikap atau disposisi ini dapat mempengaruhi sejauh mana kebijakan dapat diimplementasikan dengan sukses. Jika para pemangku kepentingan memiliki sikap positif dan mendukung, peluang untuk berhasil dalam pelaksanaan kebijakan akan jauh lebih besar.

d) Struktur birokrasi, Struktur birokrasi implementasi kebijakan dapat berbeda-beda tergantung pada ruang lingkup dan kompleksitas kebijakan yang diterapkan serta struktur pemerintahan suatu negara. Namun secara umum, struktur birokrasi implementasi kebijakan dapat mencakup beberapa elemen penting. Setiap komponen struktur perlu memiliki peran yang jelas dan mendukung untuk mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan.

3. Menurut Merilee S. Grindle

Menurut Grindle (dalam Subarsono, 2011) pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua variabel besar, yaitu:

a) Isi kebijakan Isi kebijakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Isi kebijakan mencakup rincian tujuan, maksud, metode, aturan dan tindakan yang harus diambil untuk mencapai hasil yang diinginkan. Teks kebijakan yang baik memastikan bahwa setiap aspek implementasi dipertimbangkan dan dijelaskan dengan jelas. Kejelasan isi kebijakan membantu menghindari kesalahpahaman, mengurangi risiko meningkatkan peluang keberhasilan implementasi. dan

b) Lingkungan kebijakan, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Lingkungan kebijakan mencakup faktor eksternal yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, baik secara positif maupun negatif. Pengaruh lingkungan kebijakan dapat mempengaruhi motivasi, keberhasilan, dan kelancaran pelaksanaan. Oleh karena itu, analisis dan pemahaman yang baik terhadap lingkungan kebijakan sangat penting untuk mengatasi hambatan keberhasilan.

4. Menurut Charles O. Jones

Menurut Jones (1996: 296) dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara seksama, yakni:

a. Organisasi: Pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak.

b. Interpretasi: Menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.

c. Penerapan: Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Secara lebih rinci mengenai organisasi, interpretasi (*interpretation*), dan penerapan (*applications*), penulis memaknainya sebagai berikut. Pertama, aktivitas pengorganisasian (*organization*) merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan). Kedua, aktivitas interpretasi (*interpretation*) merupakan aktivitas penjelasan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Terakhir, ketiga, aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada. Bertumpu pada apa yang dikemukakan Jones di atas, maka masalah implementasi kebijakan publik atau implementasi program semakin lebih jelas dan luas.

Tabel 1. 3 Model-model Implementasi Kebijakan

Variabel Implementasi	Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn	Model Edward III	Model Charles O. Jones	Merilee S. Grindle
	1. Ukuran dan tujuan kebijakan Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level	a) Komunikasi keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan	1.Organisasi: Pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak.	1. Isi kebijakan (<i>Content of Policy</i>), mencakup ; 1. Kepentingan yang mempengaruhi (Interest Affected). Interest Affected ini berkaitan dengan berbagai

	<p>pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal, maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana, tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi atau sikap para pelaksana (implementors). Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang penting. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Meter dan Van Horn, 1974).</p>	<p>kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.</p>	<p>kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan</p> <p>2. Tipe manfaat (<i>Type Of Benefits</i>), pada poin ini isi kebijakan berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif.</p> <p>3. Derajat perubahan yang ingin dicapai (<i>Extent Of Change Envision</i>), setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Isi kebijakan yang ingin dijelaskan haruslah memiliki skala yang jelas.</p> <p>4. Letak pengambilan keputusan (<i>Site Of Decision Making</i>), pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, apakah letak sebuah</p>
--	---	--	---

				<p>program sudah tepat.</p> <p>5. Pelaksanaan program (Program Implementer), dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel bagi keberhasilan suatu kebijakan.</p> <p>6. Sumber-sumber daya yang digunakan (<i>Resources Committed</i>), apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang mendukung agar pelaksanaan berjalan dengan baik.</p>
	<p>2. Sumber Daya Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Merencanakan implementasi kebijakan penting untuk mengidentifikasi</p>	<p>B. Sumber daya Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber</p>	<p>2. Interpretasi: Menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.</p>	<p>2. Lingkungan Implementasi (<i>Context Of Implementation</i>), mencakup ; 1. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat (<i>Power, Interest, and Strategy of Actor Involved</i>). Dalam suatu</p>

	<p>an sumber daya yang diperlukan, mengalokasikan mereka dengan bijak, dan memastikan bahwa mereka tersedia sepanjang jalur implementasi.</p>	<p>daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.</p>	<p>kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.</p> <p>2.Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa (<i>Institution and Regime Characteristic</i>). Lingkungan dimana suatu kebijakan itu dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, bagian ini dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.</p> <p>3.Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana (<i>Compliance and Responsiveness</i>). Pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.</p>
--	---	---	---

	<p>3.Karakteristik Organisasi Pelaksana Karakter atau sifat organisasi yang meliputi struktur birokrasi yaitu mencakup struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi organisasi, koordinasi antar organisasi dan proses interaksi antar organisasi.</p>	<p>C. Disposisi Watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.</p>	<p>3.Penerapan: Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.</p>	
	<p>4.Komunikasi antar organisasi Komunikasi antar organisasi Penting untuk diingat bahwa komunikasi bukan hanya tentang penyampaian informasi tetapi juga tentang menumbuhkan pemahaman, dukungan dan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan. Memperhatikan prinsip komunikasi yang</p>	<p>D. Struktur Birokrasi Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan</p>		

	efektif, maka implementasi kebijakan mempunyai peluang keberhasilan yang lebih besar.	menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.		
	<p>5. Disposisi atau sikap para pelaksana</p> <p>Sikap para pelaksana atau kecenderungan tersebut berperan penting dalam implementasi kebijakan yang seharusnya. Jika para pelaksana kebijakan mempunyai sikap positif dan suportif, maka peluang keberhasilan implementasi kebijakan akan jauh lebih besar.</p>			
	<p>6. Kondisi sosial, ekonomi dan politik Lingkungan ekonomi, sosial dan politik merupakan aspek eksternal dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan yang harus saling kondusif. Aspek ini dapat mendukung maupun menghambat berjalannya implementasi kebijakan.</p>			

1.6 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang menjadi konsep utama (pokok) yang diamati dalam penelitian, yang disertai dengan operasionalisasi tolok ukur atas konsep tersebut. Dari uraian di atas maka operasionalisasi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Di Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara

Implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara adalah kegiatan atau langkah aktor-aktor yang terlibat dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan pasar tradisional yang telah dibuat sesuai dengan regulasinya. Maka dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara menggunakan Implementasi Kebijakan menurut Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2016 terdiri dari :

A. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan

1. Standar Operasional Prosedur (SOP)
2. Para pengelola yang terlibat menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan
3. Pelaksanaan kegiatan

B. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan memberi perlindungan, pemeliharaan pasar dalam menjaga ketertiban dan keamanan pasar

1. Proses Koordinasi Dengan Pihak-Pihak Terkait

2. Bentuk perlindungan, pemeliharaan pasar dalam menjaga ketertiban dan keamanan pasar

C. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan pasar

1. Proses koordinasi dan pihak yang terlibat

D. Memberikan arahan kepada para pedagang agar menjaga penggunaan fasilitas yang ada sesuai ketentuan yang ditetapkan

1. Bentuk memberikan arahan kepada para pedagang

E. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas pasar

1. Proses Pengawasan

2) Faktor Pendukung dan Penghambat implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara

Variabel Implementasi yang sama dari model-model implementasi di atas:

1. Komunikasi

- a) Dukungan
- b) Komunikasi dan Koordinasi

2. Sumber daya

- a) Sumber Daya Manusia
- b) Sumber Daya Finansial

3. Disposisi Pelaksana

- a) Sikap para pelaksana dengan adanya kebijakan pengelolaan pasar

Tabel 1. 4 Operasionalisasi Konsep

No.	Konsep	Fenomena	Gejala	Sub Gejala
1	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Di Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara	Implementasi Kebijakan	Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Para pengelola yang terlibat menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan 3. Pelaksanaan kegiatan
2			Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan memberi perlindungan, pemeliharaan pasar dalam menjaga ketertiban dan keamanan pasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses Koordinasi Dengan Pihak-Pihak Terkait 2. Bentuk perlindungan, pemeliharaan pasar dalam menjaga ketertiban dan keamanan pasar
3			Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan pasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses koordinasi dan pihak yang terlibat
4			Melakukan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas pasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses Pengawasan
5			Memberikan arahan kepada para pedagang agar menjaga penggunaan fasilitas yang ada sesuai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk memberikan arahan kepada para pedagang

			ketentuan yang ditetapkan;	
6	Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara	Teori Van Meter & Van Horn	Sumber Daya	1. Sumber Daya Manusia 2. Sumber Daya Finansial
7			Komunikasi antar-Organisasi	1. Dukungan 2. Komunikasi dan Koordinasi
8			Disposisi	1. Sikap para pelaksana dengan adanya kebijakan pengelolaan pasar

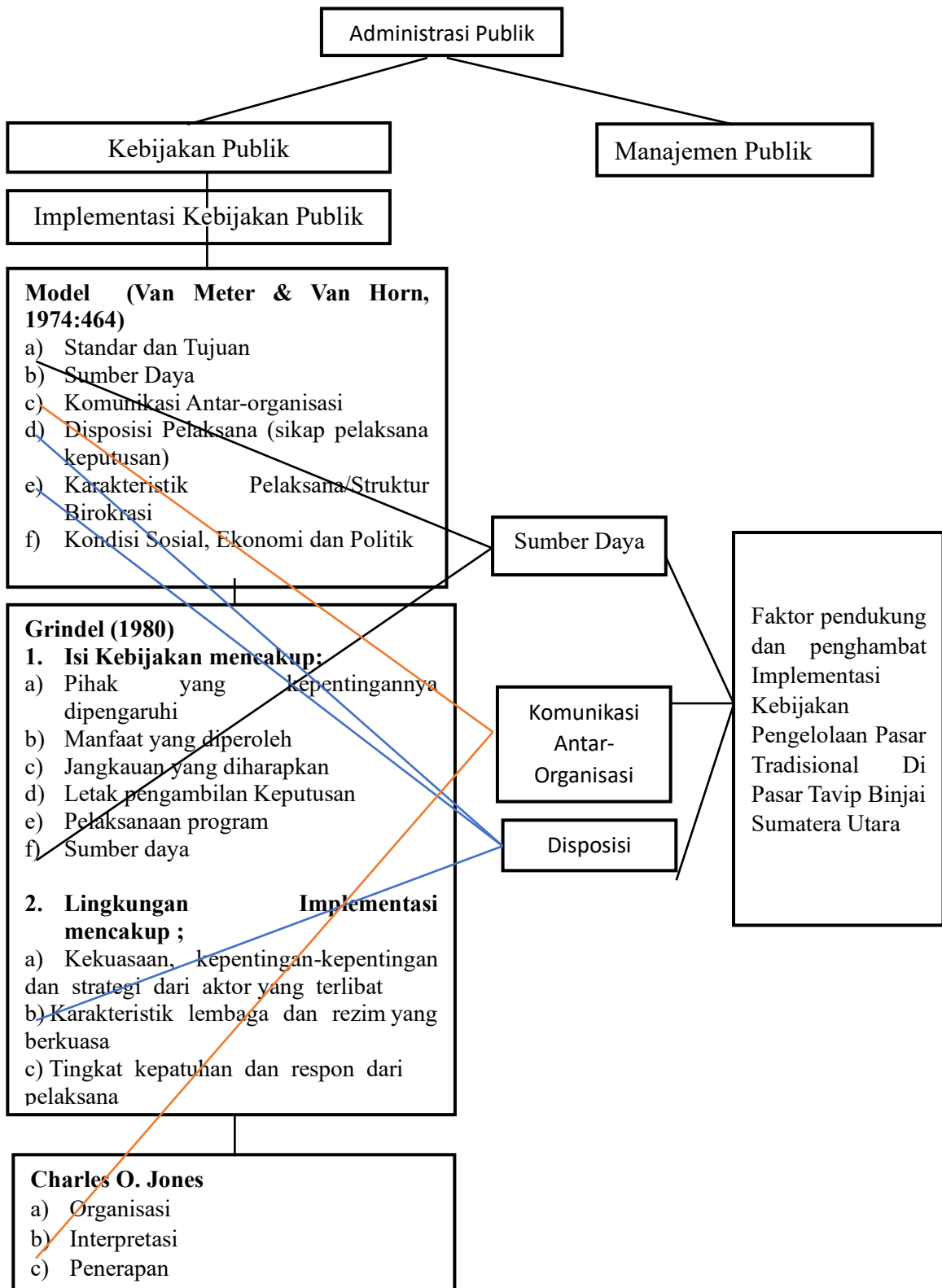
1.7 Argumen Penelitian

Argumen penelitian berisi jawaban atau rumusan masalah yang ada sesuai dengan teori-teori yang terdapat pada literatur dan dibuat berdasarkan kerangka pemikiran teoritis. Pada penelitian ini argumen yang dimiliki peneliti atas masalah yang terjadi dalam Penerapan atau Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Di Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan sebelumnya dalam latar belakang yaitu manajemen yang kurang profesional dapat dilihat dari tidak adanya pembangunan gedung pasar Tavip kembali setelah kebakaran pada tahun 2016, tidak ada lahan parkir, tidak adanya pembinaan atau sosialisasi terhadap pedagang, fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai terkait bak penampungan sampah. Implementasi keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan menurut Pasal 17 Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2016 Pengelolaan Pasar yang terdiri dari: a) menyusun dan

melaksanakan rencana kegiatan b) melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan memberi perlindungan, pemeliharaan pasar dalam menjaga ketertiban dan keamanan pasar c) melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan pasar d) memberikan arahan kepada para pedagang agar menjaga penggunaan fasilitas yang ada sesuai ketentuan yang ditetapkan e) melakukan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas pasar dan untuk faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan dilihat dari tiga variabel dari model implementasi yang terdiri dari: komunikasi Antar-Organisasi, sumber daya dan disposisi.

1.8 Kerangka Pemikiran

Gambar 1. 8 Kerangka Pemikiran Penelitian



1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

David Williams (dalam Moleong, 2007:5) mendefinisikan penelitian kualitatif yaitu penghimpunan informasi pada hal yang wajar, memanfaatkan metode yang dipilih, dan dikerjakan peneliti yang memiliki ketertarikan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian berupa metode penelitian kualitatif menggunakan jenis deskriptif dimana penulis mengamati lalu melakukan wawancara secara langsung dengan informan terpilih yang berkaitan dengan permasalahan terkait implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah lokasi atau tempat penelitian itu dilakukan. Informasi-informasi terkait untuk data yang diperlukan dapat ditemukan di situs penelitian (Wiratna Sujarwene, 2014). Penelitian ini berlokasi di Pasar Tavip Kota Binjai di wilayah Kota Binjai Jl. Husni Thamrin, Pekan Binjai, Binjai Kota, Sumatera Utara dengan luas sekitar 12 Ha dengan jumlah kios 2100. dibawah naungan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Disperindag) Kota Binjai, karena di lokasi penelitian ini terdapat masalah terkait mengenai implementasi kebijakan.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden pada penelitian kualitatif disebut sebagai informan atau partisipan, yaitu individu atau kelompok yang memberi informasi tentang data yang diinginkan oleh peneliti, terutama yang berkaitan dengan penelitiannya. Menurut Sugiyono (2019), subjek penelitian adalah pihak yang

berkaitan dengan yang diteliti (informan atau narasumber) untuk mendapatkan informasi terkait data penelitian yang merupakan sampel dari sebuah penelitian. Penelitian ini memiliki subjek yang terkait implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara. Peneliti membutuhkan sejumlah informan sehingga melibatkan beberapa *key informan* dalam penelitian terkait implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara. Subjek penelitian ini adalah:

1. Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan
2. Kepala Seksi (Kasi) Pengelolaan Pasar
3. Koordinator Keamanan Pasar
4. Koordinator Kebersihan Pasar
5. Pedagang

1.9.4 Jenis Data

Menurut Sugiyono (2015), jenis data dibedakan menjadi 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif secara sederhana dapat berupa kata atau kalimat yang dapat didefinisikan. Sedangkan data kuantitatif merupakan data dalam bentuk angka. Penelitian ini menggunakan data kualitatif.

1.9.5 Sumber Data

Data merupakan berbagai informasi yang dikumpulkan untuk mendukung sebuah penelitian. Sebuah data harus diolah kembali untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sebuah penelitian. Menurut Edi Riadi (2016:48) Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah, sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari peninjauan langsung di lapangan pada objek penelitian, data tersebut diperoleh dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak-pihak yang berkompeten yang akan diproses untuk tujuan penelitian. Sumber data primer ini diperoleh dari observasi dan wawancara secara langsung terkait implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai sumber lain yang terdiri dari laporan, catatan, dokumen, dan studi pustaka yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya mengenai implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena bertujuan untuk mendapatkan data (Sugiyono, 2016 :101). Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang diharapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek penelitian, dan selanjutnya mengadakan pencatatan terhadap gejala-gejala yang ditemukan di lapangan. Adapun data yang peneliti kumpulkan melalui metode ini adalah data-

data yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada pihak yang terkait dengan suatu tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara. Mendapatkan informasi tersebut peneliti melakukan wawancara kepada Pengurus pasar yang mengelola pasar tersebut dan para pedagang di pasar. Metode ini dipandang sebagai metode yang relevan untuk memperoleh data secara langsung terkait dengan implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang ada di lokasi penelitian atau sumber-sumber lain yang terkait dengan objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga penelitian ini akan memperoleh data yang sah dan lengkap. Data dokumentasi ini berupa foto lokasi penelitian berupa bangunan pasar, sarana dan prasarana pasar dan dokumen Peraturan Walikota Binjai.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data adalah proses mengatur urusan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar” (patton, 2002:97). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif,

yaitu yang menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan dari para informan. Teknik analisis data ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data dan informasi, kemudian data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan muncul gambaran yang dapat mengungkapkan permasalahan penelitian dan kemudian dapat menarik kesimpulan.

Menurut Miles dalam Emzir (2016:129-135) ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan selama proses penelitian berlangsung sehingga perlu disederhanakan dan dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan cara menyederhanakan, memilih, merangkum, dan memfokuskan data yang relevan dengan permasalahan penelitian yaitu menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah memaparkan data yang direduksi dengan tujuan memberikan gambaran keseluruhan tentang data yang diperoleh selama penelitian. Penyajian data dilakukan dengan cara membuat narasi tentang menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara.

c. Penarikan kesimpulan

Tahap terakhir dari analisis data yaitu mengambil kesimpulan. Pengambilan kesimpulan berangkat dari rumusan masalah dan tujuan penelitian. Data yang telah diproses kemudian diambil kesimpulan yang objektif kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada reduksi data dan penyajian data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti. Tahap ini dibutuhkan interpretasi dan peneliti yang memerlukan pertimbangan yang matang agar tidak salah memberi kesimpulan atau penafsiran data. Penelitian ini penyusunan mengambil kesimpulan dengan cara melihat kembali reduksi dan penyajian data agar penarikan kesimpulan tidak melenceng dari permasalahan penelitian yaitu menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara.

1.9.8 Kualitas Data

Menurut Sugiyono (2015:83), triangulasi data adalah teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai sumber data yang telah ada. Wijaya (2018:120-121) menjelaskan bahwa triangulasi data adalah teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Ini mencakup tiga jenis triangulasi: sumber, teknik, dan waktu.

1. **Triangulasi Sumber:** Menguji kredibilitas data dengan mengecek data dari berbagai sumber seperti wawancara, arsip, dan dokumen lainnya.
2. **Triangulasi Teknik:** Menguji kredibilitas data dengan menggunakan teknik yang berbeda pada sumber yang sama. Misalnya, data yang diperoleh melalui observasi kemudian dicek kembali dengan wawancara.

3. **Triangulasi Waktu:** Memastikan kredibilitas data dengan melakukan pengecekan pada waktu atau situasi yang berbeda. Data yang diambil pada pagi hari, saat narasumber masih segar, biasanya lebih valid. Oleh karena itu, kredibilitas data diuji melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada waktu yang berbeda sampai data yang kredibel diperoleh.

Pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Menguji kredibilitas data dengan mengecek data dari berbagai sumber seperti wawancara, arsip, dan dokumen-dokumen yang berkaitan tentang pengelolaan Pasar Tavip Kota Binjai.